

## **SOSIALISASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI MANAJEMEN PT. ARSA TJAKRA SUMIRAT**

**Saksono Budi<sup>\*1</sup>, Edian Fahmy<sup>2</sup>, Devi Putri Isnaeni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
dosen02310@unpam.ac.id<sup>\*1</sup>, edianfahmy@unpam.ac.id<sup>2</sup>, dosen02285@unpam.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan utama pendirian Perusahaan oleh stakeholder untuk memaksimalkan perolehan keuntungan atau laba, namun perusahaan diharuskan tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berkelanjutan seharusnya mengorientasikan keuntungan (profit), menyejahterakan masyarakat umum termasuk karyawan (people), serta menjaga kondisi lingkungan hidup (planet). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) membawa banyak manfaat bagi perusahaan, tidak hanya dalam aspek keuangan tetapi juga dalam reputasi dan keberlanjutan bisnis. Tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen fakultas ekonomi dan bisnis, universitas pamulang melakukan sosialisasi terkait pentingnya perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Dari hasil kegiatan diketahui perusahaan belum mengerti dan masih belum mengetahui manfaat dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi keberlangsungan perusahaan. Namun dari hasil kegiatan PT. Arsa Tjakra Sumirat. Akan tetapi perusahaan akan berkomitmen semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good corporate governance untuk keberlanjutan perusahaan dengan meminta tim pengabdian untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam proses asesmennya.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, Manajemen, Asesmen*

## PENDAHULUAN

Good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur antar hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Budi, S., & Kurniawati, D. (2025).

Penerapan good corporate governance telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbangnya. Maka diperlukan adanya sistem pengelolaan serta pengendalian manajerial yang tepat pada perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Widiyanta, M, I. (2022).

Kalau melihat kilas balik yang terjadi pada tahun 1998 krisis keuangan yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh Kawasan Asia yang menyebabkan memberatkan kehidupan bagi semua kalangan bahwa salah satu factor penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Perhatian terhadap corporate governance terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2020).

Dalam kasus-kasus yang terjadi kinerja perusahaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di negara lainnya. Gunarsih, M. P. (2020).

Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk mengimbangnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengolahan dan pengendalian manajerial yang tepat dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Namun demikian, akibat dari krisis ekonomi yang melanda, membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas pada umumnya terhadap pentingnya penerapan GCG. Adhiprasetya, A. d. (2019).

Penerapan GCG juga telah menjadi sebuah isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta sustainable dimasa yang akan datang. Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkan good corporate governance tersebut sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Syakhroza (2000) dalam Indrayani & Nurkholis (2001), terdapat dua penyebab munculnya isu good corporate governance yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global. Dan kedua, semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemasok, kreditur, investor dan pemerintah.

GCG merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lainnya. GCG juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pada titik inilah pertanyaan reflektif tentang integritas, tanggung jawab dan independensi patut ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan di Indonesia.

Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan good corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003). Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum GCG telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip GCG, termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek GCG

Good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur antar hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Zuhriyah, G. (2019).

Perusahaan dengan praktik CG yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham karena visi, misi dan strategi perusahaan dinyatakan dengan jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (Ruhayat, E., Hakim, D. R., & Handy, I. (2022).

Terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam Prinsip-prinsip OECD 2004. Hediono, B, P. (2019). Prinsip – prinsip ini melandasi beberapa riset tentang pengukuran tingkat penerapan *corporate governance* pada perusahaan. Keenam prinsip tersebut adalah:

a. Menjamin Kerangka Dasar *corporate governance* yang Efektif

Prinsip pertama menyatakan bahwa corporate governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan

fungsi dan tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

b. Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham

Prinsip *corporate governance* yang kedua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak pemegang saham dan fungsi – fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsip ketiga ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

Untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham, seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertentu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

d. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*

Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability*) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan.

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para *stakeholder* dengan perusahaan.

Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

e. Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip kelima ini ditegaskan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara *insidental*.

Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

f. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui tata kelola perusahaan pada PT. Arsa Tjakra Sumirat dan untuk mengetahui usaha perusahaan memperhatikan dampak lingkungan akibat operasionalnya.

## METODE

Beberapa solusi yang bisa dijadikan formula untuk mengatasi permasalahan pada PT. Arsa Tjakra Sumirat dengan menelaah persoalan - persoalan dalam perusahaan yang muncul menyebabkan penerapan GCG di Indonesia dapat dikatakan gagal. Persoalan yang paling utama adalah mengenai perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia yang masih lemah. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan GCG di Indonesia adalah mengubah budaya organisasi yang kurang mendukung prinsip-prinsip GCG, seperti kurangnya transparansi, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman akan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG.

Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair. 4 Faktor apa saja yang dapat menghambat penerapan good governance antara lain Korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, kesewenang-wenangan, penyerobotan, penindasan, penistaan, dan sebagainya tak henti mendera para pengelola negara. Langkah dan kebijakan untuk menghentikan praktik-praktik yang menghambat perwujudan good governance pun dilakukan. Agustina, Y., Winarno, A., & Dyan, A. (2021).

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya menerapkan good corporate governance. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Penerapan good corporate governance atau GCG sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Berikut sejumlah manfaat penerapan GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya

sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel; yang dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan stakeholders perusahaan, misalnya kreditor, supplier, masyarakat, pemerintah, konsumen, serta lembaga swadaya masyarakat. Sugiarti, N. (2019).

Good corporate governance diartikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder, namun berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku. Sudirgo, J. A. (2020).

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang good corporate governance PT. Arsa Tjakra Sumirat. Kegiatan PKM dengan tema " Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Manajemen PT. Arsa Tjakra Sumirat". dilaksanakan hari Kamis sampai Sabtu tanggal 22 April 2024 - 27 Mei 2024. Kegiatan PKM yang dilakukan tim dosen pada PT. Arsa Tjakra Sumirat menggunakan metode Metode Diskusi Kelompok. Metode diskusi kelompok adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan diantara 5 sampai dengan 10 peserta (sasaran) dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk. cara penyajian pembelajaran, di peserta diberikan pemaparan kemudian diberikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Materi pada pembahasan kali ini terkait pentingnya menerapkan Good corporate governance untuk keberlangsungan perusahaan jangka Panjang.

Metode Panel adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik, diperlukan 3 orang atau lebih panulis dengan seorang pemimpin. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode diskusi panel adalah suatu teknik pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa ikut berperan aktif. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yang akan memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru.

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian.[1] Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan dalam melakukan Good corporate governance dinilai belum memahami dan belum dapat membuatnya dengan baik, semua itu disebabkan karena masih minimnya sumber daya yang ada sehingga jobdesk 1 karyawan bisa berbagai macam, sehingga akan sangat sulit dalam menerapkan Good corporate governance di PT. Arsa Tjakra Sumirat. Akan tetapi perusahaan akan berkomitmen semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good corporate governance untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga perusahaan bisa berkontribusi menjaga lingkungan.

Dalam melakukan tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan Good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang

saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur antar hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Ronni, A, I. (2019).

Pedampingan dan pelatihan dilakukan oleh dosen pengabdian selama beberapa tahap dimana tahap pertama adalah tahap sosialisasi atau penyampaian materi, pada tahapan ini perusahaan sudah memahami pentingnya Good corporate governance. Penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan penerapan GCG yang baik di lingkungan Perusahaan, di antaranya: Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan. Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan. Mengelola sumber daya secara lebih baik. Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai dan mutu suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang sehat.



**Gambar 1:** Kegiatan sosialisasi penerapan Good corporate governance (GCG)

**Tabel 1.** Solusi Permasalahan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Belum memahami Good corporate governance (GCG)	Memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan melalui penerapan Good corporate governance (GCG)
2.	Belum memiliki instrument penilaian untuk melaksanakan Good corporate governance (GCG)	Memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada manajemen terkait penerapan Good corporate governance (GCG)

## KESIMPULAN

Dalam melakukan tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan Good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur antar hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera.

Pedampingan dan pelatihan dilakukan oleh dosen pengabdian selama beberapa tahap dimana tahap pertama adalah tahap sosialisasi atau penyampaian materi, pada tahapan ini perusahaan sudah memahami pentingnya Good corporate governance. Penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan penerapan Good corporate governance (GCG) yang baik di lingkungan Perusahaan, di antaranya: Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan. Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan. Mengelola sumber daya secara lebih baik. Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai dan mutu suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang sehat.

Upaya yang dilakukan tim pengabdian selaku dosen Universitas Pamulang untuk menambah pengetahuan tentang Good corporate governance dinilai belum memahami dan belum dapat membuat melakukannya dengan baik, semua itu disebabkan karena masih minimnya sumber daya yang ada sehingga jobdesk 1 karyawan bisa berbagai macam, sehingga akan sangat sulit dalam menerapkan Good corporate governance di PT. Arsa Tjakra Sumirat. Akan tetapi perusahaan akan berkomitmen semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good corporate governance untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga perusahaan bisa berkontribusi menjaga lingkungan. Dengan begitu harapannya perusahaan mendapat kepercayaan dari masyarakat maupun negara kareba PT. Arsa Tjakra Sumirat dalam operasional perusahaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja melainkan juga memperhatikan kepentingan public serta regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah sehingga perusahaan dapat tetap menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam hal ini selaku tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pamulang dan Yayasan Sasmita Jaya yang telah memberikan kepercayaan dalam bentuk pemberian penugasan serta dukungan moril dalam kegiatan sosialisasi penerapan Good Corporate Governance di PT. Arsa Tjakra Sumirat. Tim pengabdian juga mengucapkan terimakasih kepada PT. Arsa Tjakra Sumirat yang bersedia menjadi mitra dalam hal ini sebagai tempat kegiatan PKM yang telah menerima dan bersikap sangat baik selama kegiatan berlangsung.

### REFERENSI

- Adhiprasetya, A. d. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1-10.
- Agustina, Y., Winarno, A., & Dyan, A. (2021). Good Corporate Governance And Financial Performance On Capital Adequacy Ratio: A Reflection Of Indonesian Conventional Banking. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 7(2), 293–306.
- Budi, S., & Kurniawati, D. (2025). The Influence of Stakeholder Pressure and Audit Quality on Sustainability Performance. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 6(1), 139–147.
- Gunarsih, M. P. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Perusahaan Public Tahun 2009- 2017.
- Hediono, B. P. (2019). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *JRMB*, 14(1). 47-58
- Ronni, A. I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2013-2017. UIN Raden Intan Lampung
- Ruhyat, E., Hakim, D. R., & Handy, I. (2022). Does Stakeholder Pressure Determine Sustainability Reporting Disclosure?: Evidence From High-Level Governance Companies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 432–453.
- Sudirgo, J. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Vol.2, 498 – 507.
- Sugiarti, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Universitas Pancasakti. Tegal
- Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2020). Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: an empirical analysis. *Social Responsibility Journal*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2018-0135>
- Widiyanta, M. I. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Zuhriyah, G. (2019). The Influence Of Corporate Governance Company Performance At Manufacturing Companies Which Is Listing In Indonesia Stock Exchange. *JOM FKIP – UR VOLUME 6*.